



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Profil Perusahaan**

Sejak era reformasi bergulir di tengah percatutan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1

Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. *Pertama*, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum optimal. *Kedua*, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara

ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi.

## **2.2 Visi dan Misi**

### **2.2.1. Visi**

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

### 2.3 Logo Perusahaan

Gambar 2.1 Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



*(Sumber: Dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)*

#### **Tugas dan Fungsi**

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistic produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
6. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

## 2.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan pada peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006, terdiri atas:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat DJPB



Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

**1) Bagian Program**

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, pengelolaan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan.

**2) Bagian SDM Aparatur dan Organisasi**

Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan tata usaha Sumber Daya Manusia Aparatur dan jabatan fungsional, koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

**3) Bagian Hukum Kerjasama dan Humas**

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan advokasi hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

**4) Bagian Keuangan dan Umum**

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, tata usaha, dan rumah tangga.

Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) di dalam lingkup Sekretariat DJPB yang di kepalai oleh Bapak Darma Utama S.Pi sebagai Kasubag Humas DJPB dalam tugasnya divisi humas dibagi menjadi beberapa bagian dalam Tugas Humas bagian media relations meliputi *Press Conference*, membuat *content* media yaitu *leaflet* dan infografis, dan adanya *event* atau pameran.

Bagian Humas (Hubungan Masyarakat) yang membantu semua kegiatan dalam menyajikan atau menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk infografis, yang berisikan tentang informasi mengenai penyakit hewan laut, proses pembuatan minapadi yang nantinya akan dipublish di website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melakukan beberapa kunjungan ke daerah, atau melakukan *Press Conference* terkait masalah di bagian kelautan atau perikanan. Terutama di bagian *Media relations* yang bertugas untuk melihat seluruh pemberitaan yang ada terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di berbagai media cetak, lalu di analisis dan di rekapitulasikan dalam satu *file* selama periode 2017-2019, berita yang didapatkan melalui media cetak dan *online*.

## **2.5 Ruang Lingkup Divisi Terkait**

Dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terdapat 2 Divisi Biro Humas (Hubungan Masyarakat) yakni Biro Humas DJPB (DJPB) dan Kerja Sama Luar Negeri. Biro Hubungan Masyarakat DJPB adalah salah satu divisi yang menangani segala macam materi publikasi terkait dengan Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penulis ditempatkan dalam Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik (*media relations*). Tugasnya adalah untuk memberikan segala informasi yang berkaitan dengan informasi tentang perikanan atau kelautan.

Kegiatan *media relations* di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia:

1. *Media Monitoring*

Melihat *feedback* bagi perusahaan melalui pemberitaan yang dihasilkan media (cetak, *online*). *Media monitoring* dilakukan untuk melihat hasil pemberitaan apakah positif atau negatif. Apabila artikel yang dihasilkan negatif, perusahaan memiliki hak jawab ke media untuk melakukan konfirmasi.

2. *Press Conference*

Mengadakan *Press Conference* dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat sebuah bantuan atau kegiatan yang baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Membuat Infografis

Menjelaskan tentang informasi-informasi mengenai perikanan maupun kelautan dalam bentuk Infografis yang akan di publikasikan di *website* resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Membuat *Leaflet*

*leaflet* tersebut adalah mengenai penyakit – penyakit pada biota laut atau sistem penanaman bibit lobster, dsb. Yang nantinya akan disebarakan melalui pameran yang dilaksanakan oleh KKP, dan di publikasikan melalui *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.